

# Presiden SBY Buka Kongres Janji Sejahterakan Guru

**P**residen Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, dengan Pesawat Khusus Boeing 737-500, Selasa (1/7) sore. Presiden SBY disambut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Selatan Prof. Dr. Mahyuddin, Ketua DPRD, dan anggota Muspida Provinsi Sumatera Selatan.

Setelah beristirahat sejenak di Ruang VVIP, rombongan bergerak menuju Hotel Novotel, tempat Presiden SBY menginap. Di Palembang, Presiden menghadiri peresmian Pembukaan Kongres XX Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2008 di Ballroom Hotel Novotel.

Presiden RI dalam kunjungan kerja ke Sumatera Selatan didampingi antara lain, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Menkominfo M. Nuh, dan Jubir Presiden, Andi Mallarangeng. Sebelum rombongan Presiden tiba pada hari sebelumnya dalam rangkaian acara Kongres PGRI ini telah datang Ketua MPR, Menteri Peranan Wanita, dan Mendiknas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Pembukaan Kongres XX Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Selasa (1/7) malam di Ballroom Hotel Novotel, Palembang dengan memu-



Presiden SBY disambut dengan tarian sekapur sirih sebagai tanda penghormatan pada Kongres XX PGRI di Palembang (1/7).

kul gong didampingi Mendiknas dan Ketua Umum PGRI. Kongres XX PGRI yang berlangsung dari tanggal 30 Juni hingga 4 Juli 2008 ini mengangkat tema "Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Guru Profesional, Sejahtera, dan Terlindungi".

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Prof. Dr. H.Moh. Surya, melaporkan bahwa Kongres ini dihadiri lebih kurang 1.800 guru yang mewakili 1,6 juta anggota PGRI dari seluruh pelosok tanah air. "Kongres telah diawali dengan pertemuan akbar kaum perempuan yang dimulai tanggal 30 Juni 2008 dengan paparan dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan," ujar Surya.

"Kami berharap kehadiran

Presiden pada acara ini dapat memberikan pencerahan bagi para guru dan masa depan pendidikan nasional," kata Surya. "Pemilihan Palembang sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kongres PGRI didasarkan atas pertimbangan bahwa pemerintah dan masyarakat Sumatra Selatan telah secara nyata memberikan perhatian besar terhadap dunia pendidikan, khususnya para guru, dan juga untuk mendukung program **Visit Musi 2008**," Surya menambahkan.

Plt Gubernur Sumatra Selatan, Prof. Dr. H. Mahyudin NS menjelaskan bahwa Pemprov. Sumatra Selatan telah berupaya maksimal dalam bidang pendidikan. "Pemprov. Sumatra Selatan secara khusus telah memberikan bantuan dan perhatian kepada siswa-siswa yang kurang mampu. Selain itu, 20 persen APBD Provinsi Sumatra Selatan dialokasikan untuk bidang pendidikan. Penggunaannya sendiri untuk membangun infrastruktur serta mensejahterakan guru, karena membangun pendidikan hal yang penting. Apalagi PGRI telah memberikan banyak kontribusi dalam bidang pendidikan dan artinya turut andil membantu pemerintah," ujar Mahyudin.

Dalam kesempatan acara pembukaan Kongres tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyaksikan penyerahan penghargaan



Presiden SBY tengah memberikan sambutan pada Kongres XX PGRI.

an Ketua Umum PB PGRI berupa piagam penghargaan Dwidya Praja Nugraha kepada, di antaranya, Walikota Palembang, Eddy Santana Putra dan Bupati Lahat, Sumsel, Harunata. Diserahkan pula plakat PGRI kepada empat tokoh guru nasional dan internasional yang memajukan Majalah *Suara Guru*. Mereka, antara lain, Penasihat PB PGRI XIX Prof Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro dan Rektor Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Dr. Sumaryoto.

Mendiknas, Bambang Sudibyo pada sambutannya mengatakan upaya meningkatkan profesionalisme guru bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab organisasi profesi guru itu sendiri. "Undang-undang Sisdiknas No.20

dan penghargaan kepada PGRI atas peran, kontribusi, dan pengabdian-nya sejak berdiri pada tahun 1945 hingga sekarang yang tidak pernah putus sehingga bisa memperjuangkan nasib, kesejahteraan, dan masa depan guru di seluruh Indonesia," kata SBY.

Untuk PGRI, Presiden SBY pun berpantun. "Bunga selasih dari Kendari tak pernah layu. Terimakasih PGRI, *thank you*," seru SBY disambut tepuk tangan para undangan. Hadir dalam acara ini, antara lain, Sekjen *Education International*, Fred Van Leeuwen, Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, Menkominfo M. Nuh, Mendiknas Bambang Sudibyo, Jubir Presiden Andi Mallarangeng' Plt Gubernur

"Tadi sore Mendiknas, Mensesneg, dan Seskab yang sebelumnya berkomunikasi dengan Menteri Keuangan, berkonsultasi dengan Menko Kesra menyampaikan kepada saya setelah terus-menerus digodok, bahwa dua Peraturan Pemerintah yang sangat penting sudah rampung finalisasinya hari ini. Insya Allah dalam satu-dua hari ini akan segera saya tandatangi," ujar SBY.

"Dua PP yang sudah siap yang paling penting adalah Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar. Kalau dua ini sudah selesai, maka PP tentang guru akan dapat segera dipercepat dan diselesaikan. Kalau tiga PP ini sudah selesai maka implementasi dari UU Pendidikan kita, UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen akan lebih dijabarkan lagi dan kemudian dapat dilaksanakan dengan baik," Presiden menambahkan.

"Bagi yang tidak sabar menunggu, boleh menunggu saya di Jakarta untuk melihat penandatanganan PP tadi," canda SBY disambut gelak tawa para undangan. "Percayakan kepada saya, insya Allah dalam satu dua hari ini akan saya tandatangi," tandas SBY.



Mendiknas Bambang Sudibyo dan Dirjen PMPTK Depdiknas, Dr. Baedhowi tengah memberikan arahan tentang kebijakan pendidikan (a.l. tentang sertifikasi, PP, dsb).

Tahun 2003 dan Undang-Undang Guru No. 14 Tahun 2005 adalah dua undang-undang yang menyesak-kan dada Menteri Keuangan," kata Bambang.

"Di saat ekonomi dunia yang tidak menentu, dari dalam negeri ada desakan yang sangat pasti dari Undang-undang Sisdiknas. Namun demikian, Pemerintah terus berusaha sekeras mungkin mengatasi gejala ekonomi dunia sekaligus bisa memenuhi amanah UU Sisdiknas dan UU Guru," tambahnya.

Sementara itu Presiden SBY berharap agar Kongres XX PGRI dapat menghasilkan sesuatu yang membawa kebaikan bagi PGRI, seluruh guru, dan tentunya dunia pendidikan, bangsa, dan negara. "Saya mengucapkan terimakasih

Sumatra Selatan H.Mahyudin NS, serta tamu-tamu undangan lainnya.

### Presiden SBY Segera akan Tandatangi PP Pendanaan Pendidikan dan PP Wajib Belajar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam satu atau dua hari ini, akan menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar. Dua PP tersebut baru hari ini rampung finalisasinya. Demikian dikatakan Presiden SBY saat membuka Kongres XX PGRI di Hotel Novotel, Palembang, Selasa (1/7) malam.

### Pemerintah Secara Nyata Ingin Meningkatkan Anggaran Pendidikan

Pemerintah terus melaksanakan upaya sungguh-sungguh dan berkesinambungan untuk meningkatkan pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas serta kesejahteraan guru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal ini dalam sambutan pembukaan Kongres XX Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Hotel Novotel, Palembang. "Di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa kita ingin benar meningkatkan kualitas pendidikan kita, agar ke depan makin bermutu, mudah dijangkau, mudah diakses, dengan biaya yang tidak terlalu mahal dan bagi yang miskin gratis," kata Presiden SBY.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, ke

depan para guru dan dosen akan ditingkatkan kesejahteraannya. Tapi harus juga diiringi peningkatan kualitas, pengabdian, kemampuan mereka. **Pemerintah tahun demi tahun, lanjut SBY, secara nyata ingin meningkatkan besaran anggaran pendidikan. "Tahun demi tahun ingin meningkatkan gaji, insentif, dan kesejahteraan para**

**abdi negara, termasuk guru.** Kita utamakan mereka yang berada di garis terdepan. Gaji presiden dan menteri sudah tahun ke empat ini tidak naik karena kami ingin mengutamakan mereka," SBY menjelaskan.

Kepada Mendiknas dan pimpinan daerah, Presiden SBY menginstruksikan untuk terus meningkatkan upaya dan menjalankan

program-program nyata, termasuk mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kemampuan guru dan kesejahteraannya. "Saya juga menginstruksikan jajaran pemerintahan di seluruh Indonesia untuk membangun kerjasama dan kemitraan yang baik dengan PGRI di seluruh Indonesia," Presiden menambahkan. ■/DT/P.01/

## Belajar dari PSB, Kebingungan Hingga Pengadaan Buku

**S**epanjang tahun penerimaan siswa baru (PSB) menjadi persoalan klasik yang memusingkan masyarakat. Sepanjang tahun PSB terus mencuatkan persoalan demi persoalan yang mengerucut bak bisul terus memerah. Bisul ini tak urung pecah sebagai solusi meringankan sakit ekonomi masyarakat.

PSB 2008 menjadi bagian bisul merah yang meninggalkan kekisruhan serta serentetan tumpukan persoalan klasik. PSB 2008 bergelinding seiring dengan isu pendidikan gratis yang baru bisa dinikmati pada tataran pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi belum mengenyam manisnya madu pendidikan gratis.

PSB 2008 selang tiga pekan lalu telah usai. Persoalan awal memunculkan lagu lama yang ditandai dengan aji mumpung pihak sekolah terutama tingkat SLTA dalam mema-gu rupiah bagi iuran peserta didik alias uang pangkal yang di zamannya Soeharto disebut uang pangkal, uang gedung, atau uang masuk sekolah. Saat ini memang tak dipungkiri sejalan dengan upaya pendekatan mutu berbasis sekolah, anggaran pendidikan bisa disusun setiap sekolah berdasarkan analisis kebutuhan. Kondisi ini sangat memungkinkan bagi sekolah untuk menawarkan pagu iuran peserta didik baru. Iuran ini belakangan banyak menuai kritik masyarakat terutama masyarakat yang tingkat ekonominya melilit.

Belakangan ini pula ditemukan berbagai kesalahan prosedur sepu-

tar proses pungut memungut uang tersebut. Ujung-ujungnya bisa dimaklumi bahwa legitimasi pungutan itupun harus melalui proses musyawarah orang tua siswa/komite sekolah dan pihak sekolah. Seperti sudah dimaklumi berbagai keluhan masyarakat pun akhirnya menghilang ditelan isu-isu baru yang dilansir surat kabar.

Pasca PSB kebingungan pun muncul baik dari sekolah maupun orang tua yang mengeluhkan keterlambatan asupan dana pembelian buku pelajaran dan kisruhnya mengunduh naskah buku dari internet. Belajar dari kasus-kasus ini pula perlu dirumuskan sebuah upaya perbaikan mekanisme penyelenggaraan manajemen sekolah. Pertama, persoalan pengadaan buku oleh pemerintah difasilitasi internet ini dilakukan pemerintah guna menekan harga buku.

### Belum dikenal

Untuk menekankan harga buku, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sebenarnya sudah menyiapkan judul buku digital sebanyak 49 judul di internet. Namun, masih banyak guru dan kepala sekolah yang tidak mengetahui program tersebut.

Seandainya buku teks pelajaran yang dipakai sekolah memanfaatkan buku digital ditetapkan pemerintah seharga Rp 20.000. biaya pembelian buku yang dikeluarkan masyarakat jauh lebih rendah, bisa mencapai 25% dari pengeluaran saat ini.

Namun, keberadaan buku teks yang dibeli hak ciptanya oleh pemerintah dan diunggah (upload) di

<http://bse.depdiknas.go.id>, [www.depdiknas.go.id](http://www.depdiknas.go.id), [www.pusbuk.or.id](http://www.pusbuk.or.id), dan [www.sibi.or.id](http://www.sibi.or.id) masih belum dapat diunduh dengan cepat. Jika mencetak sendiri, biayanya justru lebih mahal.

Dalam peraturan menteri pendidikan nasional no. 24 tahun 2007 tentang standar, sarana dan prasarana untuk SD-SMA, soal buku teks pelajaran ini termasuk prasarana yang wajib disediakan sekolah sebagai syarat telah memenuhi salah satu standar nasional pendidikan.

Pengadaan buku teks pengajaran yang ditetapkan satu eksemplar per mata pelajaran untuk setiap peserta didik itu merupakan bagian dari perpustakaan sekolah.

### Tanggung jawab daerah

Suryanto, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKNAS, mengatakan, kondisi riil anggaran yang tersedia di DEPDIKNAS saat ini belum dapat membebaskan biaya pendidikan untuk seluruh komponen, termasuk buku pelajaran. "untuk pungutan-pungutan yang banyak dilakukan sekolah yang dinilai memberatkan masyarakat, yang harusnya menindak tegas itu, bupati atau walikota. Mereka itu yang punya sekolah, bisa membuat aturan di daerah untuk melarang pungutan yang tidak ada dasarnya" ujar Suryanto.

Menurut dia, pemerintah daerah juga perlu memperbesar anggaran pendidikan sehingga biaya operasional sekolah semakin ringan dan tidak membebani masyarakat.

Manajer Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch